



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 37 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang... 2

4

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan... 3

1

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1076);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 54);
22. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU... 4

- ii. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam

- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kuasa Pengguna Barang	Pengurus Barang Pembantu		
			Nama/NIP	Pangkat/Golongan ruang	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	UPT Puskesmas Air Gemuruh	Kepala Puskesmas Air Gemuruh	Susi Susanti, Amd.Keb 19780413 200303 2 001	Pengatur Tk. I II/d	Fungsional Umum
2.	UPT Limbur Lubuk Mengkuang	Kepala Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang	Arifa Ayu Pakarti, A.Md.Kes 19980228 202012 2 012	Pengatur II/c	Fungsional Umum
3.	UPT Puskesmas Pelayang	Kepala Puskesmas Pelayang	Juraida, AM.Keb 19790827 201905 2 001	Pengatur Tk. I II/d	Fungsional Umum
4.	UPT Puskesmas Muara Bungo I	Kepala Puskesmas Muara Bungo I	Ressy Ocsa Sylvia, S.Gz 19841027 201001 2 013	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
5.	UPT Puskesmas Muara Bungo II	Kepala Puskesmas Muara Bungo II	Nurhaida, AM.Kep 19910608 201503 2 003	Penata Muda III/a	Fungsional Umum
6.	UPT Puskesmas Tanjung Agung	Kepala Puskesmas Tanjung Agung	Indrawan Tauhid, AM.Kep 19850414 201503 1 000	Penata Muda III/a	Fungsional Umum
7.	UPT Puskesmas Bathin II Babeko	Kepala Puskesmas Bathin II Babeko	Rikardo, S.Sos 19830331 200701 1 004	Penata Muda III/a	Fungsional Umum
8.	UPT Puskesmas Tanah Tumbuh	Kepala Puskesmas Tanah Tumbuh	Desi Ariani, Am.Kep 19851222 201101 2 007	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
9.	UPT Puskesmas Rantau Pandan	Kepala Puskesmas Rantau Pandan	Asmarida, A.Md.Kep 19940524 202012 2 026	Pengatur II/c	Fungsional Umum
10.	UPT Puskesmas Muara Buat	Kepala Puskesmas Muara Buat	Dodi Iswahyudi, AM.Kep 19900104 201903 1 004	Pengatur Tk. I II/d	Fungsional Umum

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kuasa Pengguna Barang	Pengurus Barang Pembantu		
			Nama/NIP	Pangkat/Golongan ruang	Jabatan
1	2	3	4	5	6
11.	UPT Puskesmas Rantau Ikil	Kepala Puskesmas Rantau Ikil	Tarida Prima Yanti S, SKM 19901012 201903 2 002	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
12.	UPT Puskesmas Pulau Batu	Kepala Puskesmas Pulau Batu	Ns. Alderi Citra, S.Kep 19850414 200901 1 004	Penata III/c	Fungsional Umum
13.	UPT Puskesmas Lubuk Landai	Kepala Puskesmas Lubuk Landai	Anhariah, A.Md 19800512 200904 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
14.	UPT Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas	Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas	Sya'bandi, S.Kep.Ners 19870412 201101 1 008	Penata Tk. I III/d	Fungsional Umum
15.	UPT Puskesmas Rantau Kelayang	Kepala Puskesmas Rantau Kelayang	Syahrial, Am.Kep 19860301 201001 1 007	Penata Muda III/b	Fungsional Umum
16.	UPT Puskesmas Kuamang Kuning X	Kepala Puskesmas Kuamang Kuning X	drg. Ayu Eka Putri 19930515 202012 2 020	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
17.	UPT Puskesmas Kuamang Kuning I	Kepala Puskesmas Kuamang Kuning I	Andi Saputra, Am.Kep 19871117 201503 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
18.	UPT Puskesmas Kuamang Jaya	Kepala Puskesmas Kuamang Jaya	Didi Sutriadi, S.Kep 19821106 201101 1 006	Penata Muda Tk. I III/b	Fungsional Umum
19.	UPT Puskesmas Rimbo Tengah	Kepala Puskesmas Rimbo Tengah	Rina Marlina, A.Md.Kep 19780403 200501 2 003	Penata Muda III/a	Fungsional Umum
20.	RSUD Rantau Ikil	Direktur RSUD Rantau Ikil	Afriani Cholifah, S.Gz 19950408 202012 2 021	Penata Muda III/a	Fungsional Umum

TELAH DITELITI SESUAI KEFENTUAN

KASUBDAS PUD
TGL. 

KABAG. SUM.
TGL. 

DASMAN. SUM.
TGL. 

TELAH DITELITI OUEH

NABID
PADA TGL. 17-01-2014
PIL. KEPALA BPKAD
PADA TGL. 17-01-2014

MARZUKI, S.Sos., N.Si
NIP. 19740119901009

BHARMAWATI RACHMAT, S.Mn, ME
NIP. 19720721190201004

SEKRETARIS BUNGO
Drs. MURSHI, M.M

BUPATI BUNGO
H. SATRIADI DIMPANANTO, S.Pd, M.Pd

MASHURI